

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Badan Umum Milik Daerah (BUMD) merupakan perusahaan yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh BUMD tersebut. Dengan adanya kebijakan pemerintah dengan diberlakukannya Undang-undang yang mengatur otonomi daerah pertimbangan keuangan pusat dan daerah serta Undang-undang perpajakan tahun 2000 dan juga berlakunya pasar bebas tingkat Asia tahun 2007, maka untuk mengantisipasi tersebut setiap perusahaan BUMD dapat terus meningkatkan pelayanannya kepada *customer* agar mendapatkan *income* yang baik.

Seiring dengan pesatnya perkembangan usaha-usaha di Indonesia, pada tanggal 23 Oktober 2010 telah terbit dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi tentang Konvergensi *International Financial Reporting standart* (IFRS) yang mengakibatkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis industri harus dicabut karena sudah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) lain (Koentoro,2011:24). Meskipun Standar Akuntansi Keuangan IFRS hanya mengatur dengan basis transaksi dan bersifat *principle based*, namun dalam penerapannya terutama bagi entitas tertentu seperti entitas kecil dan menengah menimbulkan permasalahan yang kompleks mengingat ukuran dan skala keekonomian entitas Usaha Kecil Menengah (UKM) tersebut. SAK IFRS terlalu kompleks bagi entitas tersebut sehingga dipandang tidak sesuai dan sangat mahal. Selain itu dalam dunia usaha, tidak semua entitas memerlukan pelaporan

keuangan yang berbasis standar Internasional. Bagi entitas tertutup yang dimiliki oleh beberapa pihak tertentu kemungkinan tidak memerlukan informasi keuangan yang berbasis standar Internasional yang cenderung *full disclosure*. Untuk mengatasi problematika tersebut maka SAK khusus untuk kelompok entitas tersebut diterbitkan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). (IAPI 2011.14). Sebagai penggantinya maka terbit SAK baru yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*General Purpose*). Dengan adanya SAK ETAP diharapkan perusahaan kecil dan menengah dapat untuk menyusun laporan keuangannya sendiri juga dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga perusahaan dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2011. Penerapan ini diperkenankan jika Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) diterapkan secara dini, maka entitas harus menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010 (Simbolon, 2011). Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak

dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen perusahaan atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Simbolon, 2011).

PDAM Kabupaten Pamekasan merupakan Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang pelayanan air bersih kepada masyarakat, dalam perkembangannya PDAM Kabupaten Pamekasan mulai menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai pengganti PSAK sebelumnya, sejak digunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) PDAM Pamekasan seharusnya dapat menyusun laporan keuangannya sendiri. Setelah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), PDAM Kabupaten Pamekasan lebih baik dalam menyusun laporan keuangannya karena lebih mudah implementasinya dibandingkan PSAK sebelumnya yaitu PSAK IFRS, selain itu pula Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) lebih sederhana dan tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah :

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan sebelum penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)?
2. Bagaimana penyajian laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan setelah Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Perusahaan PDAM Pamekasan sebelum penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
2. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Perusahaan PDAM Pamekasan setelah penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu akuntansi khususnya laporan keuangan bagi sebuah perusahaan setelah penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK ETAP) sehingga mahasiswa dapat berkembang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peneliti selanjutnya serta bagi para akuntan dalam penyajian laporan keuangan setelah penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).